

PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE*, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SERTA IMPLIKASINYA PADA KUALITAS AKUNTABILITAS KEUANGAN

(Survei pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat)

Yehan Nurchalidza Utari¹, Elvira Zeyn²

Program Studi Magister Akuntansi, Pascasarjana, Universitas Pasundan, Indonesia

*e-mail: yehanurchalidza10@gmail.com*¹

Jl. Sumatera No. 41, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Penerapan *Good Governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan serta implikasinya pada Kualitas Akuntabilitas Keuangan pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert. Populasi penelitian ini adalah 36 Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang seluruhnya dijadikan sampel melalui teknik sampling jenuh (sensus), dengan 3 responden pada setiap perangkat daerah sehingga total responden berjumlah 108 orang, terdiri dari Kepala Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Fungsional Perencana bidang Anggaran, serta Pejabat Fungsional Pengelola Keuangan. Analisis data dilakukan dengan analisis jalur yang dioperasionalkan melalui regresi linear berganda dengan bantuan IBM SPSS *Statistics*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, Penerapan *Good Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan kontribusi sebesar 14,15%; Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan dengan kontribusi sebesar 55,74%; dan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan dengan kontribusi sebesar 23,28%. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan kontribusi sebesar 93,2%. Selanjutnya, Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Akuntabilitas Keuangan dengan kontribusi sebesar 86,1%.

Kata Kunci: *Good Governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Laporan Keuangan, Kualitas Akuntabilitas Keuangan

Abstract

This research aims to determine and analyze the effect of the implementation of Good Governance, the Government Internal Control System (SPIP), and Government Accounting Standards (SAP) on the Quality of Financial Reports and its implications for the Quality of Financial Accountability at Regional Government Agencies of the West Java Provincial Government. The research method used is quantitative with a descriptive and verificative approach. Primary data were collected through a Likert-scale questionnaire. The population consisted of 36 Regional Government Agencies within the West Java Provincial Government, all of which were used as the sample through a saturated (census) sampling technique, with 3 respondents from each agency, resulting in a total of 108 respondents, consisting of the Head of the Agency/Financial Administration Officer, the Functional Planning Officer for Budgeting, and the Functional Financial Management Officer. Data were analyzed using path analysis operationalized through multiple linear regression with the aid of IBM SPSS

Statistics. The results show that, partially, the implementation of Good Governance has a positive and significant effect on the Quality of Financial Reports, contributing 14.15%; the Government Internal Control System has a positive and significant effect, contributing 55.74%; and Government Accounting Standards have a positive and significant effect, contributing 23.28%. Simultaneously, the three variables have a positive and significant effect on the Quality of Financial Reports, contributing 93.2%. Furthermore, the Quality of Financial Reports has a positive and significant effect on the Quality of Financial Accountability, contributing 86.1%.

Keywords: *Good Governance, Government Internal Control System, Government Accounting Standards, Quality of Financial Reports, Quality of Financial Accountability*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban lembaga publik atas penggunaan dana publik secara ekonomis, efisien, dan efektif, yang salah satu wujudnya tercermin dari laporan keuangan yang disusun secara berkualitas (Mardiasmo, 2018). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 juga menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tercermin dari opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan data BPK RI atas 545 LKPD Tahun 2024 yang dirilis November 2025, tercapai 491 opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 53 Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan satu Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Hasil pemeriksaan Semester II 2025 (IHPS II, 2025) juga mengungkap 9.493 temuan permasalahan dengan potensi kerugian negara/daerah sebesar Rp42,87 triliun, yang sebagian besar berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada pemerintah daerah.

Di Provinsi Jawa Barat, opini BPK atas 28 LKPD Kabupaten/Kota periode 2022–2024 masih menyisakan beberapa daerah dengan opini WDP, di antaranya Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Pangandaran, Kota Bandung, dan Kota Bekasi, yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya bukti serta kesesuaian antara LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (BPK RI, 2025). Persoalan akuntabilitas juga tercermin dari maraknya kasus korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tercatat sebesar 34 dari skala 100 pada tahun 2023, dengan peringkat Indonesia turun ke posisi 115 dari 180 negara (Transparency International, 2023). Sepanjang 2018–2023, tercatat 16 kepala daerah di Jawa Barat terjerat kasus korupsi, di antaranya kasus suap proyek pengadaan CCTV dan jaringan internet pada Program Bandung Smart City yang menjerat pejabat Dinas Perhubungan Kota Bandung (detikjabar.com, 2022; kompas.com, 2023).

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa penerapan *Good Governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di lingkungan pemerintah daerah belum sepenuhnya optimal, sehingga berdampak pada kualitas laporan keuangan dan kualitas akuntabilitas keuangan yang dihasilkan. Temuan-temuan penelitian terdahulu mengenai pengaruh *Good Governance*, SPIP, dan SAP terhadap kualitas laporan keuangan serta implikasinya pada akuntabilitas keuangan juga masih menunjukkan hasil yang beragam. Istiqomah et al. (2020) serta Kristiani dan Yuwidianoro (2017) membuktikan bahwa *Good Governance* dan SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sudiarianti et al. (2015) menunjukkan bahwa penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

daerah, sedangkan SPIP tidak berpengaruh signifikan. Sebaliknya, Yusrianti et al. (2021) membuktikan bahwa penerapan SAP berbasis akrual dan SPIP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun pada aspek akuntabilitas, Rahman dan Firdaus (2020) serta Zeyn (2011) membuktikan bahwa penerapan SAP yang baik menghasilkan laporan keuangan berkualitas yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas akuntabilitas keuangan.

Berdasarkan latar belakang dan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu (*research gap*) tersebut, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Penerapan *Good Governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan serta implikasinya pada Kualitas Akuntabilitas Keuangan pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kerangka penelitian ini menempatkan Penerapan *Good Governance* (X1), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2), dan Standar Akuntansi Pemerintahan (X3) sebagai variabel yang memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan (Y), yang selanjutnya berimplikasi pada Kualitas Akuntabilitas Keuangan (Z). Berdasarkan kerangka tersebut, dirumuskan lima hipotesis penelitian, yaitu: (H1) *Good Governance* berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan; (H2) SPIP berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan; (H3) SAP berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan; (H4) *Good Governance*, SPIP, dan SAP secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan; dan (H5) Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Kualitas Akuntabilitas Keuangan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif melalui penelitian survei (Sugiyono, 2023). Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi Penerapan *Good Governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Laporan Keuangan, dan Kualitas Akuntabilitas Keuangan pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, sedangkan metode verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang telah dirumuskan.

Populasi penelitian ini adalah seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 36 unit, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Mengingat jumlah populasi kurang dari seratus, teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh (*sensus*), sehingga seluruh 36 Perangkat Daerah dijadikan sampel penelitian, dengan masing-masing perangkat daerah diwakili oleh 3 responden, yaitu Kepala Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Fungsional Perencana bidang Anggaran, dan Pejabat Fungsional Pengelola Keuangan, sehingga total responden berjumlah 108 orang.

Tabel 1. Populasi dan Sampel Penelitian

No	Perangkat Daerah	Jumlah Responden
1	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	3 Responden
2	Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat	3 Responden
3	Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat	3 Responden
4	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat	3 Responden
5	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	3 Responden
6	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat	3 Responden
7	Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat	3 Responden
8	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	3 Responden

9	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat	3 Responden
10	Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat	3 Responden
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat	3 Responden
12	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat	3 Responden
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat	3 Responden
14	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	3 Responden
15	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat	3 Responden
16	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat	3 Responden
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat	3 Responden
18	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat	3 Responden
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	3 Responden
20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat	3 Responden
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat	3 Responden
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat	3 Responden
23	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat	3 Responden
24	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat	3 Responden
25	Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat	3 Responden
26	Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat	3 Responden
27	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat	3 Responden
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat	3 Responden
29	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat	3 Responden
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	3 Responden
31	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat	3 Responden
32	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat	3 Responden
33	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat	3 Responden
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat	3 Responden
35	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	3 Responden
36	Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat	3 Responden

Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022, data diolah peneliti (2026)

Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner berskala Likert 1–5, serta data sekunder berupa jurnal dan literatur relevan. Sebelum digunakan, instrumen penelitian diuji validitas dan reliabilitasnya; seluruh butir pernyataan dinyatakan valid dan reliabel dengan nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,60. Analisis data dilakukan menggunakan analisis jalur (path analysis) yang dioperasionalkan melalui dua sub-struktur regresi linear berganda dengan bantuan IBM SPSS Statistics, yaitu: sub-struktur 1 untuk menguji pengaruh *Good Governance* (X1), SPIP (X2), dan SAP (X3) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y), serta sub-struktur 2 untuk menguji pengaruh Kualitas Laporan Keuangan (Y) terhadap Kualitas Akuntabilitas Keuangan (Z). Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan koefisien determinasi (R²).

HASIL PENELITIAN

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh butir kuesioner dinyatakan valid dengan nilai hitung lebih besar dari tabel pada tingkat signifikansi 5%. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian, yaitu *Good Governance*, SPIP, SAP, Kualitas Laporan Keuangan, dan Kualitas Akuntabilitas Keuangan memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,60, sehingga seluruh instrumen dinyatakan reliabel.

Secara deskriptif, hasil analisis menunjukkan bahwa Penerapan *Good Governance* pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat berada pada kategori sangat baik, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berada pada kategori sangat memadai, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berada pada kategori sangat baik, Kualitas Laporan Keuangan berada pada kategori sangat berkualitas, dan Kualitas Akuntabilitas Keuangan berada pada kategori sangat berkualitas.

Analisis Sub-Struktur 1: Pengaruh *Good Governance*, SPIP, dan SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linear Berganda Sub-Struktur 1

Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	1,535	0,063	-	24,338	0,000
Good Governance (X1)	0,057	0,032	0,153	2,768	0,000
SPIP (X2)	0,181	0,037	0,580	4,849	0,000
SAP (X3)	0,074	0,024	0,250	3,164	0,002

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Berdasarkan Tabel 2, diperoleh persamaan regresi: $Y = 1,535 + 0,057X_1 + 0,181X_2 + 0,074X_3$. Nilai konstanta sebesar 1,535 menunjukkan bahwa apabila *Good Governance*, SPIP, dan SAP dianggap konstan, maka Kualitas Laporan Keuangan diprediksi sebesar 1,535. Koefisien regresi ketiga variabel bernilai positif, yang berarti peningkatan pada masing-masing variabel akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan.

Tabel 3. Koefisien Determinasi Parsial Sub-Struktur 1 (Beta × Zero-order)

Variabel	Beta	Zero-order	KD Parsial
<i>Good Governance</i> (X1)	0,153	0,925	14,15%
SPIP (X2)	0,580	0,961	55,74%
SAP (X3)	0,250	0,931	23,28%
Jumlah	-	-	93,17%

Berdasarkan Tabel 3, *Good Governance* memberikan kontribusi parsial sebesar 14,15%, SPIP sebesar 55,74%, dan SAP sebesar 23,28% terhadap Kualitas Laporan Keuangan. SPIP merupakan variabel yang memberikan kontribusi parsial terbesar, diikuti oleh SAP dan *Good Governance*.

Tabel 4. Rangkuman Hasil Pengujian Hipotesis Sub-Struktur 1 (Uji t)

Model	Beta	t hitung	Sig.	t tabel (df=94)	H0
<i>Good Governance</i> (X1)	0,153	2,768	0,000	1,986	Ditolak
SPIP (X2)	0,580	4,849	0,000	1,986	Ditolak
SAP (X3)	0,250	3,164	0,002	1,986	Ditolak

Berdasarkan Tabel 4, nilai thitung pada ketiga variabel independen (*Good Governance*, SPIP, dan SAP) lebih besar dari ttabel sebesar 1,986 dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima untuk H1, H2, dan H3. Dengan demikian, *Good Governance*, SPIP, dan SAP masing-masing

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Tabel 5. Uji F (Simultan) Sub-Struktur 1

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	23,948	3	7,983	431,474	0,000
Residual	1,739	94	0,019	-	-
Total	25,687	97	-	-	-

a. *Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)*; b. *Predictors: (Constant), SAP, SPIP, Good Governance*

Berdasarkan Tabel 5, diperoleh nilai Fhitung sebesar 431,474 lebih besar dari Ftabel sebesar 2,701 pada $df_1 = 3$ dan $df_2 = 94$, dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga *Good Governance*, SPIP, dan SAP secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Tabel 6. Koefisien Determinasi Simultan Sub-Struktur 1

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,936	0,932	0,930	0,13602

Berdasarkan Tabel 6, diperoleh nilai R Square sebesar 0,932, yang menunjukkan bahwa 93,2% variasi Kualitas Laporan Keuangan dipengaruhi oleh *Good Governance*, SPIP, dan SAP secara bersama-sama, sedangkan sisanya sebesar 6,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, implementasi sistem informasi manajemen daerah, dan peran auditor internal.

Analisis Sub-Struktur 2: Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Kualitas Akuntabilitas Keuangan

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Sub-Struktur 2

Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	0,928	0,425	-	2,111	0,042
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	1,115	0,124	0,839	24,396	0,000

a. *Dependent Variable: Kualitas Akuntabilitas Keuangan (Z)*

Berdasarkan Tabel 7, diperoleh persamaan regresi: $Z = 0,928 + 1,115Y$. Koefisien regresi Kualitas Laporan Keuangan bertanda positif sebesar 1,115, yang berarti setiap peningkatan satu satuan Kualitas Laporan Keuangan akan meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan sebesar 1,115 satuan. Nilai thitung sebesar 24,396 lebih besar dari ttabel sebesar 1,985 pada $df = 96$, dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Akuntabilitas Keuangan.

Tabel 8. Koefisien Determinasi Sub-Struktur 2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,928	0,861	0,860	0,21019

Berdasarkan Tabel 8, diperoleh nilai R sebesar 0,928 yang menunjukkan hubungan positif dan sangat kuat antara Kualitas Laporan Keuangan dan Kualitas Akuntabilitas Keuangan. Nilai R Square sebesar 0,861 menunjukkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan mampu menjelaskan 86,1% variasi Kualitas Akuntabilitas

Kuangan, sedangkan sisanya sebesar 13,9% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti komitmen kepala daerah dan audit kinerja.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Good Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan kontribusi sebesar 14,15%. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik penerapan prinsip partisipasi, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Aminy et al. (2021), Vika Erinna et al. (2020), Swastika dan Widhiyani (2020), Istiqomah et al. (2020), dan Alhidayat (2019) yang membuktikan bahwa Good Governance berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan kontribusi terbesar, yaitu 55,74%. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern yang berjalan baik akan meminimalkan kesalahan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini konsisten dengan penelitian Ayu Reswari dan Nazir (2022), Ardianto dan Eforis (2019), serta Siahaan dan Simanjuntak (2020) yang menunjukkan bahwa semakin baik penerapan SPIP, semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan kontribusi sebesar 23,28%. Penerapan SAP berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 memungkinkan entitas pemerintah menyajikan laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Yanti et al. (2020), Ikriyati dan Aprila (2019), serta Abdurrahim et al. (2019) yang menyimpulkan bahwa implementasi SAP berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Secara simultan, Good Governance, SPIP, dan SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan kontribusi sebesar 93,2%, sedangkan sisanya sebesar 6,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, implementasi sistem informasi manajemen daerah, dan peran auditor internal. Besarnya kontribusi simultan ini menegaskan bahwa ketiga aspek tata kelola tersebut saling melengkapi dalam mendukung tersusunnya laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Kualitas Laporan Keuangan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Akuntabilitas Keuangan dengan kontribusi sebesar 86,1%. Temuan ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami akan meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, penilaian kinerja keuangan, keandalan sistem informasi, serta tindak lanjut atas hasil penilaian akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Hasil ini konsisten dengan penelitian Rahman dan Firdaus (2020) serta Zeyn (2011) yang membuktikan bahwa laporan keuangan yang berkualitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah.

KESIMPULAN

Penerapan Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat masing-masing berada pada kategori sangat baik, sangat memadai, dan sangat baik, sedangkan Kualitas Laporan Keuangan dan Kualitas Akuntabilitas Keuangan berada pada

kategori sangat berkualitas. Secara parsial, *Good Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan kontribusi sebesar 14,15%; Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan dengan kontribusi sebesar 55,74%; dan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan dengan kontribusi sebesar 23,28%. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan kontribusi sebesar 93,2%, sedangkan 6,8% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian. Selanjutnya, Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Akuntabilitas Keuangan dengan kontribusi sebesar 86,1%, sedangkan 13,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih melibatkan masyarakat dalam memonitor penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mempermudah akses informasi publik, menjaga konsistensi kebijakan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan, serta segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK guna meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang relevan, seperti pemanfaatan teknologi informasi, implementasi sistem informasi manajemen daerah, peran auditor internal, komitmen kepala daerah, dan audit kinerja, serta memperluas cakupan wilayah penelitian ke tingkat provinsi atau kabupaten/kota lain.

REFERENSI

- Abdurrahim, A., Hidayati, D. N., & Budiarto, B. (2019). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat). https://doi.org/10.1007/978-94-024-1267-3_100369
- Alhidayat, S. (2019). Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP 01) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD di Kabupaten Enrekang.
- Aminy, R., Pituringsih, E., & Widiastuty, E. (2021). Analisis Penerapan Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Valid: Jurnal Ilmiah*, 18(2), 136–147. <https://doi.org/10.53512/valid.v18i2.181>
- Ardianto, R., & Eforis, C. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bina Akuntansi*, 6(1), 97–98.
- Ayu Reswari, Y., & Nazir, N. (2022). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Good Public Governance Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kementerian Ketenagakerjaan. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 2(9), 1051–1059. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i9.487>
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2025). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025. bpk.go.id.
- Ikriyati, T., & Aprila, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131–140. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.131-140>

- Istiqomah, S. P., Sri, S., & Sriyono. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal of Islamic Accounting Research*, 2(1).
- Kristiani, F. P., & Yuwidianoro, A. (2017). Pengaruh Penerapan Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Kajian Akuntansi*, 12(2), 113–122.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Rahman, Y., & Firdaus, F. (2020). Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Di Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 6, 410–420.
- Siahaan, S. B., & Simanjuntak, A. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Manajemen*, 6(2), 129–138.
- Sudiaranti, N. M., Ulupui, I. G. K. A., & Budiasih, I. G. A. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi*, 10(8).
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Swastika, I. B. P. J., & Widhiyanti, N. L. S. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Jembrana. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(11).
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Vika Erinna, A. T., Irma, & Doni. (2020). Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pada OPD Kota Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1).
- Yanti, N. S., Made, A., & Setiyowati, S. W. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–8.
- Yusrianti, H., et al. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Zeyn, E. (2011). Pengaruh good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 21–36.